

**EVALUASI KEBIJAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA RANGGO KECAMATAN PAJO
KABUPATEN DOMPU**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

**EVALUASI KEBIJAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA RANGGO KECAMATAN PAJO
KABUPATEN DOMPU**

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

RIRIN WARNIDASARI

NPM 22201091019

Pembimbing Utama

Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si

Pembimbing Pendamping

Langgeng Racmatullah Putra, S.AP., M.AP.

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

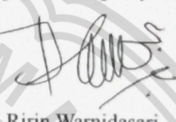
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 07 April 2026

Yang membuat pernyataan



Ririn Warnidasari
NPM. 22201091019



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA RANGGO KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU**

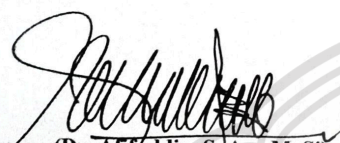
Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 7 April 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Afiduddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004


(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)
NPP. 191605199232105

Mengetahui,


Kantor Program Studi Administrasi Publik
(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)
NPP. 191605199232105



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA RANGGO KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

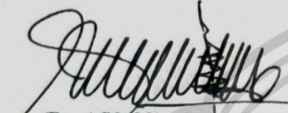
LULUS

Malang, 23 Mei 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji I


(Dr. Afifuddin, S. Ag., M. Si)
NPP. 21515061974321004


(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)
NPP. 191605199232105

Anggota Penguji II


(Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.Pol.Sc)
NPP. 152312198832234

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi


(Dr. Afifuddin, S. Ag., M. Si)
NPP. 21515061974321004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud ikhtiar, doa, dan pembelajaran panjang dalam perjalanan akademik saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang saya miliki.
2. Kedua orang tua tercinta, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kesabaran, serta dukungan moral dan materi yang menjadi fondasi utama dalam setiap langkah hidup dan pendidikan saya.
3. Keluarga saya, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan kepercayaan sehingga saya mampu bertahan dan terus berproses hingga tahap ini.
4. Dosen pembimbing dan seluruh dosen, yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, arahan, serta kritik yang membangun selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan, yang telah menemani proses belajar, berbagi cerita, semangat, serta menjadi bagian dari perjalanan akademik yang penuh dinamika.
6. Diri saya sendiri, yang telah berusaha bertahan, bangkit, dan tidak menyerah meskipun melalui berbagai keraguan dan kelelahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi langkah awal untuk perjalanan akademik dan pengabdian selanjutnya.

MOTTO

*“Setiap langkah dalam perjalanan memiliki makna,
Baik saat pergi maupun saat pulang”*
(TERE LIYE, PULANG)

*“Perang telah usai, aku bisa pulang,
kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”*
(NADIN AMIZAH)



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Waramatullahi Wabarakaktuh

Alhamdulillahirabbil Alamin, Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu”. Skripsi tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab akademik, tetapi juga perjalanan panjang penuh pelajaran, ketekunan, dan makna. Skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk menyandang gelar sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Selain itu skripsi ini merupakan persembahan sebagai bukti semangat usaha penulis dalam memperjuangkan sebuah gelar sarjana.

Dalam setiap lembar tertulis, tersimpan upaya, harapan, serta dukungan dari banyak pihak yang telah menjadi cahaya di tengah keraguan, dan pelita di kala kelelahan datang menghampiri. Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran mereka yang tulus membantu dan mendoakan, karya sederhana ini takkan pernah terwujud. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan rendah hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Junaidi, M.Pd, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang sekaligus dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan, disampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan beliau.

3. Bapak Langgeng Racmatullah Putra, S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, sekaligus dosen pembimbing II yang dengan keikhlasannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyempurnakan skripsi ini. Disampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan beliau.
4. Bapak Dr. Didik Supriyanto, S.SOS., ST.,M selaku Dosen Wali Penulis. Disampaikan terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk penulis mulai dari semester 1 sampai sekarang.
5. Bapak/Ibu Dosen Staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, bapak M. Yakub, S.Pd. dan ibu Nurdewiyati, S.Pd, atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta kesabaran yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Doa dan pengorbanan beliau menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan. Panjang umur dan sehat selalu papa dan mama.
7. Seluruh saudara dan keluarga, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, serta semangat kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran saudara dan keluarga menjadi penguat di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keteguhan.
8. Seluruh informan penelitian yang telah berkenan dan baik hati memberikan pandangan dan jawaban atas setiap pertanyaan penelitian. Semoga kebaikan bapak dan ibu mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, yang telah menemani proses panjang penyusunan skripsi ini dengan kebersamaan, dukungan, semangat, serta saling menguatkan dalam berbagai kondisi. Diskusi, canda, keluh kesah, dan perjuangan yang dilalui bersama menjadi bagian

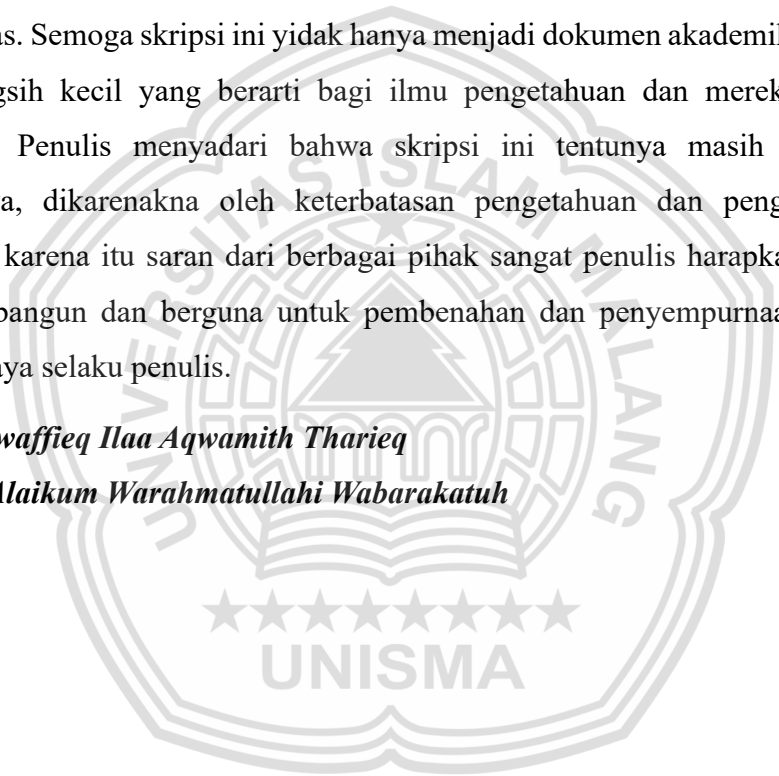
berharga yang membantu penulis tetap bertahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, keterbatasan, serta tantangan selama penyusunan skripsi ini. Atas segala lelah, ragu, dan jatuh bangun yang berhasil dilewati, penulis patut menghargai setiap usaha yang telah dilakukan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.

Semoga Allah membalas segala kebaikan orang-orang yang telah disebut namanya diatas. Semoga skripsi ini yidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga sumbangsih kecil yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan mereka yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya, dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan yang bersifat membangun dan berguna untuk pembenahan dan penyempurnaan serta memotivasi saya selaku penulis.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ririn Warnidasari lahir di Dompu pada tanggal 30 Juni 2006. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dan menjadi satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Penulis lahir dari pasangan Bapak Muhammad Yakub, S.Pd. dan Ibu Nurdewiyati, S.Pd. Penulis berasal dari Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, NTB.

Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Pajo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pajo, dan SMA Negeri 1 Dompu. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Malang pada Program Studi Administrasi Publik.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti proses perkuliahan dan menyelesaikan berbagai tugas akademik sebagai bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa.

Saat ini penulis sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa ranggo kecamatan pajo kabupaten dompu” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Islam Malang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

RINGKASAN

Ririn Warnidasari, 2026. NPM 22201091019. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S. Ag., M. Si., Dosen Pembimbing II : Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi beban hidup keluarga miskin serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaan PKH di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat lemahnya validasi data dan dugaan kedekatan penerima dengan aparat desa atau pihak tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa quality control pemerintah dalam proses pengawasan, verifikasi, dan evaluasi pelaksanaan PKH masih belum optimal. Akibatnya, muncul kecemburuan sosial, rendahnya transparansi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Selain itu, bantuan PKH juga belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat karena lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek. Permasalahan tersebut menjadi alasan penting dilakukannya penelitian mendalam untuk mengevaluasi kebijakan PKH di Desa Ranggo serta dampak kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2000) yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai dasar analisis tujuan pertama. Selain itu, teori dampak kebijakan menurut Dunn (2003) digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan PKH yang mencakup dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak distribusional. Kedua kerangka teori tersebut digunakan untuk memahami kinerja kebijakan sekaligus implikasinya terhadap kehidupan masyarakat desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan distribusi manfaat masyarakat di Desa Ranggo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan wawancara mendalam sebagai teknik utama. Penelitian dilaksanakan di Desa Ranggo pada tahun 2025–2026, dengan pengumpulan data pada 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah desa, pendamping PKH, masyarakat penerima manfaat, dan masyarakat umum. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu mampu membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, tetapi belum berhasil mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Evaluasi kebijakan

memperlihatkan bahwa meskipun program relatif efektif dalam meringankan beban hidup masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan pada aspek efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran. Permasalahan tersebut terutama dipengaruhi oleh lambatnya pembaruan data penerima, keterbatasan kewenangan pemerintah desa, serta rendahnya transparansi informasi. Dari sisi dampak, PKH memberikan manfaat ekonomi yang bersifat sementara, dampak sosial yang bersifat ganda berupa perubahan perilaku positif sekaligus munculnya kecemburuan sosial, serta dampak distribusional yang belum merata di antara kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, evaluasi kebijakan, dampak kebijakan



SUMMARY

Ririn Warnidasari, 2026. NPM 22201091019. Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Islam Malang. Policy Evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Ranggo Village, Pajo District, Dompu Regency. Supervisor I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si., Supervisor II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

The Family Hope Program (PKH) is a government policy that aims to reduce the burden on poor families and improve access to education and health. However, the implementation of PKH in Ranggo Village, Pajo District, Dompu Regency still faces various problems, especially the inaccuracy of the target beneficiaries due to weak data validation and the alleged proximity of the recipients to village officials or certain parties. This condition shows that the government's quality control in the process of supervision, verification, and evaluation of the implementation of PKH is still not optimal. As a result, there is social jealousy, low transparency, and declining public trust in the implementation of the program. In addition, PKH assistance has also not been fully able to encourage the economic independence of the beneficiaries because it is more used for short-term consumptive needs. This problem is an important reason for conducting in-depth research to evaluate the PKH policy in Ranggo Village and the impact of the policy.

This study employs the public policy evaluation theory proposed by Dunn (2000), which includes the aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as the analytical framework for the first research objective. In addition, the policy impact theory by Dunn (2003) is used to analyze the impacts of the PKH policy, covering economic impacts, social impacts, and distributional impacts. These theoretical frameworks are applied to examine policy performance as well as its implications for rural community life.

The research method used is a qualitative approach with the type of case study research. The focus of the research is directed at the evaluation of the policies of the Family Hope Program (PKH) which includes aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy, as well as the impact of policies on economic, social, and community benefit distribution in Ranggo Village. Data collection is carried out through observation, in-depth interviews, and documentation with in-depth interviews as the main technique. The research was carried out in Ranggo Village in 2025–2026, with data collection from December 22, 2025 to January 10, 2026. The research informants consisted of elements of the village government, PKH assistants, beneficiary communities, and the general public. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman, and Saldana models which included data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that the Family Hope Program (PKH) in Ranggo Village, Pajo District, Dompu Regency is able to help poor families in meeting their education and health needs, but has not succeeded in encouraging sustainable economic independence. Policy evaluation shows that although the program is relatively effective in easing the burden of people's lives, its implementation still faces various weaknesses in terms of efficiency, adequacy,

leveling, responsiveness, and accuracy of targets. These problems are mainly influenced by the slow updating of recipient data, limited authority of the village government, and low transparency of information. In terms of impact, PKH provides temporary economic benefits, dual social impacts in the form of positive behavior changes as well as the emergence of social jealousy, as well as uneven distribution impacts among needy community groups.

Keywords: *Family Hope Program (PKH), policy evaluation, policy impacts.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi rumah tangga di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius yang berkaitan erat dengan risiko kemiskinan. Lebih dari sepertiga keluarga masih menempati hunian tidak layak dan menghadapi keterbatasan akses air minum, sanitasi, serta bangunan kokoh. Kerentanan ekonomi semakin meningkat akibat inflasi, pengangguran, dan rendahnya literasi finansial terutama pada keluarga yang dipimpin perempuan (bps.co.id, 2024). Lebih dari separuh rumah tangga juga mengalami ketidakamanan pangan yang berimbas pada gizi anak dan kesehatan keluarga (kompas.com, 2025). Akses sanitasi yang belum merata memperkuat siklus kemiskinan karena tingginya biaya kesehatan dan menurunnya produktivitas (bps.co.id, 2024).

Tekanan ekonomi turut memengaruhi keputusan pernikahan dan perceraian yang bersinggungan dengan kemiskinan. Penurunan angka pernikahan dan lonjakan perceraian memperlihatkan kekhawatiran finansial generasi muda dan meningkatnya risiko ibu rumah tangga miskin. Penurunan penduduk miskin menjadi 23,85 juta jiwa tidak mengurangi kerentanan terhadap biaya hidup di perkotaan, terutama pangan dan transportasi. Ketidakamanan pangan, keterbatasan fasilitas dasar, serta rendahnya keterampilan manajemen keuangan semakin menghambat upaya keluarga miskin untuk mandiri (bps.co.id, 2024).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan menjadi krusial karena jutaan rumah tangga masih rentan meskipun tren penurunan kemiskinan terlihat (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015). Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai instrumen kunci untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin (Purwanto, 2013). Program ini fokus pada dukungan berbasis syarat agar keluarga memperoleh manfaat sekaligus meningkatkan kapasitas mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Batu pijakan ini diperlukan untuk memperkecil peluang kemiskinan antargenerasi (Sawitri & Rahmat, 2025).

PKH dirancang sebagai bantuan tunai bersyarat yang menuntut partisipasi aktif keluarga miskin untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini memastikan bantuan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kewajiban pendidikan, kesehatan, serta mekanisme verifikasi (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015). Implementasinya mencakup perencanaan, pemutakhiran data, pendampingan, dan penyaluran dengan peran penting pendamping PKH dalam memastikan kepatuhan dan keberhasilan program (Sawitri & Rahmat, 2025). Komponen bantuannya dari ibu hamil hingga lansia mendorong keluarga miskin memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan akses layanan dasar (Sawitri & Rahmat, 2025).

Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa PKH memberikan pengaruh positif tetapi masih menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, lambatnya pembaruan data, dan rendahnya graduasi mandiri (Purwanto, 2013). Pemerintah memperbaiki tata kelola melalui verifikasi lebih kuat, digitalisasi

data, dan peningkatan kualitas pendamping, serta integrasi program pemberdayaan ekonomi untuk mempercepat kemandirian keluarga (Ahmad, Arham, & Djuuna, 2025). Sawitri dan Rahmat (2025) menegaskan pentingnya sosialisasi luas agar keluarga memahami nilai strategis layanan pendidikan dan kesehatan. Upaya perbaikan ini diharapkan memperkuat PKH sebagai instrumen efektif menurunkan kemiskinan dan membangun kemandirian masyarakat (Sawitri dan Rahmat, 2025).

Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti PKH, dinamika kemiskinan di NTB menunjukkan tantangan struktural masih kuat. Penurunan angka kemiskinan dari 13,85% pada Maret 2023 menjadi 11,78% pada Maret 2025 merupakan capaian positif, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perbedaan tren antara perkotaan dan perdesaan memunculkan ketimpangan; kemiskinan di kota meningkat dari 11,64% menjadi 12,02%, sementara di desa menurun karena produktivitas pertanian, terutama padi dan jagung (ntb.bps.co.id, 2025).

Kesenjangan pendapatan di NTB memperdalam jurang kemiskinan, terlihat dari meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menandakan beban ekonomi semakin berat bagi warga miskin lapisan terbawah. Kelompok ini memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan produktif, dan layanan kesehatan, sehingga risiko kemiskinan menahun tetap tinggi. Struktur ekonomi yang masih bergantung sektor primer memperkecil peluang mobilitas sosial, sementara masalah kesehatan seperti stunting sebesar 29,8% pada 2025 menunjukkan pemenuhan gizi anak-anak masih belum optimal,

berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan (ntb.bps.co.id, 2025).

Di Kabupaten Dompu, tantangan kemiskinan menunjukkan karakter kompleks, dengan 11,59% penduduk atau 32.080 jiwa masih berada dalam kondisi rentan, termasuk 151 jiwa kategori sangat ekstrem dan 8.134 jiwa kategori ekstrem. Dampak pandemi Covid-19, penyesuaian standar garis kemiskinan, dan keterbatasan pasokan pangan memperburuk kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar. Upaya pemerintah melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan program strategis seperti PKH berperan mendorong kemandirian pangan, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga rentan, serta mencegah kemiskinan antargenerasi (rri.co.id, 2025).

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Dompu menunjukkan dinamika kompleks sesuai karakter sosial-ekonomi masyarakat. Program bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat, pendampingan terstruktur, dan kepatuhan terhadap syarat layanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keberhasilan program bergantung pada peran pendamping PKH dalam memastikan kepatuhan keluarga, mekanisme verifikasi rutin, serta penggunaan data DTKS yang akurat sebagai dasar penetapan penerima manfaat dan proses graduasi (rri.co.id, 2025). Pencapaian tujuan jangka panjang mengandalkan perubahan perilaku keluarga, peningkatan kapasitas, dan motivasi untuk mencapai kemandirian ekonomi (rri.co.id, 2025).

Mekanisme pelaksanaan PKH di Dompu pada dasarnya bergantung pada peran pendamping dalam melakukan validasi data, verifikasi kepatuhan, pemantauan keluarga, serta mendorong graduasi KPM. Koordinasi antara pendamping, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor penentu kelancaran program. Namun, keterlambatan pencocokan data dan proses validasi yang rumit sering menyebabkan sebagian keluarga menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian status bantuan. Selain itu, meskipun pengurangan penerima baik karena graduasi mandiri maupun ketidaksesuaian data dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan program, kondisi tersebut juga mengungkap persoalan ketepatan sasaran serta adanya penyalahgunaan bantuan dan rendahnya literasi keuangan yang membatasi peningkatan taraf hidup KPM (rri.co.id, 2025).

Permasalahan tersebut tampak lebih jelas ketika ditarik ke konteks lokal di Desa Ranggo, di mana tantangan pelaksanaan PKH justru menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Dompu lainnya. Hasil pra-penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan PKH di Desa Ranggo belum berjalan secara optimal, terutama terkait akurasi data penerima manfaat. Ketidaktepatan sasaran terlihat dari adanya penerima bantuan yang bukan berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria program, melainkan memiliki kedekatan dengan kepala desa, aparat desa, atau pihak yang mendukung kepala desa pada saat pemilihan. Praktik nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan ini memperparah persoalan validasi data yang secara sistemik memang sudah menjadi hambatan di tingkat kabupaten. Kondisi tersebut juga menunjukkan

masih lemahnya *quality control* pemerintah dalam melakukan pengawasan, verifikasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH di tingkat desa. Akibatnya, tercipta rasa ketidakadilan di tengah masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat desa dalam mengelola program sosial pemerintah.

Fenomena lain yang turut memperkuat indikasi belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan PKH di Desa Ranggo adalah rendahnya tingkat transparansi informasi terkait pelaksanaan program. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah penerima, kriteria kelayakan, serta jadwal penyaluran bantuan. Ketertutupan ini menimbulkan kecurigaan terhadap aparat pelaksana dan menciptakan persepsi negatif mengenai kejujuran dalam pengelolaan dana bantuan. Masyarakat menjadi tidak memahami alasan di balik keputusan siapa yang berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak.

Indikasi lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PKH belum berjalan efektif terlihat dari belum tercapainya tujuan program untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sebagian besar penerima bantuan masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup pada bantuan pemerintah tanpa disertai peningkatan kapasitas ekonomi yang berarti. Bantuan PKH pada praktiknya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, seperti pangan, biaya pendidikan anak, dan pengeluaran harian rumah tangga, sehingga manfaatnya cepat habis dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Keterbatasan nilai bantuan

serta kondisi ekonomi penerima yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap mendorong penerima untuk memprioritaskan kebutuhan dasar daripada pengembangan ekonomi produktif.

Selain itu, rendahnya peningkatan kapasitas ekonomi penerima juga dipengaruhi oleh minimnya pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Pendampingan PKH lebih difokuskan pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan, sementara pembinaan keterampilan usaha dan pengelolaan ekonomi keluarga belum berjalan optimal. Pola penerimaan bantuan yang bersifat rutin tanpa strategi transisi menuju kemandirian turut membentuk ketergantungan penerima terhadap bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH masih berfungsi sebagai perlindungan sosial jangka pendek dan belum sepenuhnya mendorong perubahan ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah belum adanya pembaruan data penerima manfaat secara berkala. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa orang warga diketahui bahwa adanya nama-nama penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai penerima aktif. Selain itu, terdapat individu yang kondisinya sudah berubah dari kurang mampu menjadi mampu, tetapi datanya belum diperbarui.

Masalah empirikal menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kebijakan PKH di lapangan dengan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2000), yang mengemukakan tentang enam kriteria yang dapat digunakan untuk

menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pelaksanaan PKH di Desa Ranggo menunjukkan kelemahan pada hampir seluruh aspek, mulai dari ketidaktepatan sasaran, rendahnya efisiensi anggaran, hingga distribusi manfaat yang tidak merata dan dipengaruhi kedekatan politik. Responsivitas dan ketepatan juga belum tercapai karena kebijakan yang ada kurang menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut belum diarahkan pada upaya membangun kemandirian melalui pendampingan yang bersifat produktif (Dunn, 2000).

Dari sudut pandang normatif, pelaksanaan PKH di Desa Ranggo belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Ketika penerima manfaat berasal dari kalangan mampu atau memiliki kedekatan dengan aparat desa, pelaksanaan program telah menyimpang dari norma hukum dan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar PKH. Ketidaktepatan validasi dan pemutakhiran data seperti masih tercatatnya penerima yang sudah meninggal atau tidak lagi miskin menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi (Permensos No. 1 Tahun 2018).

Selain tidak sesuai regulasi PKH, pelaksanaan di Desa Ranggo belum mencerminkan prinsip *good governance* UNDP (1999). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masih rendah, terlihat dari akses informasi tertutup, minim pelibatan masyarakat, serta mekanisme pelaporan lemah, sehingga legitimasi sosial kebijakan berkurang dan keputusan didominasi aparat desa.

Efektivitas dan efisiensi program belum tercapai, dengan pemborosan dana, ketidaktepatan sasaran, dan lambannya pembaruan data, sementara ketidakadilan distribusi bantuan menurunkan kepercayaan publik, menekankan perlunya fondasi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat (UNDP, 1999).

Berdasarkan kondisi real di lapangan dan diperkuat dengan teorikal problem dan normatif problem tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat indikasi masalah dalam pelaksanaan dan dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam. Adapun judul lengkap penelitian ini adalah **“Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan PKH di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana dampak kebijakan PKH terhadap masyarakat di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi tentang:

1. Evaluasi kebijakan PKH di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.
2. Dampak kebijakan PKH terhadap masyarakat di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori evaluasi kebijakan publik Dunn (2000) yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi PKH di Desa Ranggo bertujuan memperluas pemahaman tentang sejauh mana pelaksanaan dan hasil kebijakan bantuan sosial memenuhi kriteria tersebut, sekaligus memperjelas hubungan antara tujuan program dan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan masukan bagi pengembangan model evaluasi kebijakan sosial lokal.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Ranggo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah Desa Ranggo sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PKH, khususnya efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan. Informasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sistem pendataan, pengawasan, koordinasi antarpetugas, dan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi keluarga penerima manfaat di masa mendatang.

2. Bagi Masyarakat Desa Ranggo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Desa Ranggo dalam memahami tujuan dan mekanisme PKH, serta hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat. Temuan ini juga diharapkan mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap akuntabilitas publik, sehingga keberhasilan program lebih mudah tercapai melalui peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan masukan terhadap pelaksanaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi empiris dalam mengkaji kebijakan bantuan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal yang berguna untuk memperluas kajian pada wilayah yang berbeda. Data dan analisis yang dihasilkan dapat membantu peneliti berikutnya dalam menyusun kerangka teoritis maupun metodologis yang lebih mendalam.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.1.1 Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diterima mampu meringankan beban hidup keluarga penerima manfaat dan menjaga keberlanjutan akses anak terhadap sekolah serta layanan kesehatan. Namun, capaian tersebut masih berada pada level pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan belum sepenuhnya mengarah pada perubahan kondisi sosial ekonomi yang lebih berkelanjutan. Program lebih berfungsi sebagai penyangga sosial daripada instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Ditinjau dari aspek efektivitas, PKH di Desa Ranggo dinilai cukup berhasil dalam mencapai tujuan operasional, yaitu penyaluran bantuan kepada sebagian keluarga miskin dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, tujuan strategis berupa pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga

belum tercapai secara optimal. Kejelasan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh penerima manfaat, sementara mekanisme evaluasi dan indikator keberhasilan yang digunakan masih lebih menekankan pada aspek administratif, bukan pada perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Pada aspek efisiensi, pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai keterbatasan. Beban kerja administratif yang tinggi, proses pembaruan data yang lambat, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas pelaksana membuat penggunaan sumber daya kebijakan belum sebanding dengan hasil substantif yang dicapai. Aparat desa dan pendamping telah menunjukkan komitmen moral dan profesional dalam menjalankan tugas, tetapi keterbatasan kewenangan dan sistem yang bersifat sentralistik mengurangi ruang gerak mereka dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Aspek kecukupan menunjukkan bahwa bantuan PKH membantu penerima manfaat untuk bertahan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan secara menyeluruh. Bantuan lebih banyak digunakan untuk konsumsi harian dan kebutuhan sekolah anak, sementara kebutuhan riil masyarakat terkait penguatan ekonomi, akses pekerjaan, dan peningkatan kapasitas produktif belum terakomodasi. Minimnya partisipasi publik dalam perumusan dan penyesuaian kebijakan turut memperlemah kemampuan PKH dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat Desa Ranggo.

Pada aspek perataan, distribusi manfaat PKH belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif. Masih ditemukan keluarga miskin yang tidak memperoleh bantuan, sementara sebagian penerima justru telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi. Ketimpangan ini berdampak pada akses yang tidak setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Keterbatasan transparansi dan lambatnya pembaruan data memperkuat masalah perataan dalam pelaksanaan PKH.

Aspek responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah desa dan pendamping PKH telah merespons keluhan masyarakat, tetapi respons tersebut belum selalu diikuti oleh solusi yang konkret dan berkelanjutan. Mekanisme partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan reaktif, komunikasi kebijakan belum berjalan optimal, serta pengambilan keputusan cenderung lambat karena bergantung pada kewenangan di tingkat atas. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perbaikan kebijakan.

Pada aspek ketepatan, PKH di Desa Ranggo belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan substantif yang dihadapi masyarakat. Ketidaktepatan sasaran penerima, penggunaan bantuan yang lebih bersifat konsumtif, serta ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dan kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan masih menjadi persoalan utama. Kebijakan belum cukup adaptif terhadap

dinamika kemiskinan di tingkat desa dan belum sepenuhnya mendorong perubahan sosial ekonomi yang lebih mendasar.

Mengacu kepada kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan PKH di Desa Ranggo menempatkan program ini sebagai kebijakan yang berjalan dan bermanfaat secara terbatas, tetapi belum optimal dalam mencapai tujuan jangka panjang pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kelemahan pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh, terutama pada pembaruan data, penguatan peran desa, peningkatan transparansi, serta integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi agar kebijakan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

6.1.2 Dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu memberikan dampak yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun distribusional. Dampak yang muncul tidak bersifat tunggal, melainkan memperlihatkan kombinasi antara manfaat nyata dan persoalan lanjutan yang menyertainya. Kebijakan PKH berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang membantu masyarakat miskin bertahan, namun belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan struktural dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa.

Dari sisi dampak ekonomi, PKH terbukti membantu rumah tangga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya biaya pendidikan anak dan kebutuhan konsumsi harian. Bantuan tersebut meningkatkan daya beli masyarakat pada waktu tertentu dan mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek. Namun perubahan pendapatan rumah tangga bersifat sementara dan tidak diikuti peningkatan produktivitas atau peluang ekonomi baru. Bantuan lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada pengembangan usaha, sehingga kemandirian ekonomi keluarga belum terwujud secara signifikan.

Pada dampak sosial, PKH memunculkan pengaruh yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, program ini mendorong perubahan perilaku positif, seperti meningkatnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan kesehatan anak. Di sisi lain, ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan keterbukaan informasi memicu kecemburuan sosial, menurunkan kohesi sosial, dan memengaruhi dinamika hubungan antarwarga. Relasi antara penerima dan nonpenerima bantuan menjadi lebih sensitif, dengan munculnya rasa tidak adil dan kecurigaan, meskipun konflik terbuka berskala besar belum terjadi.

Dari perspektif dampak distribusional, penelitian menunjukkan bahwa manfaat PKH belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Masih terdapat warga miskin yang tidak memperoleh bantuan, sementara sebagian penerima justru telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi. Ketimpangan ini berdampak pada

akses yang tidak setara terhadap layanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, serta melemahkan pemerataan sumber daya kebijakan. Kelompok rentan yang tidak terjangkau bantuan berisiko semakin tertinggal dan memiliki kapasitas yang lebih terbatas untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Mengacu kepada kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak kebijakan PKH di Desa Ranggo lebih kuat sebagai instrumen bantuan sosial jangka pendek daripada sebagai pengungkit perubahan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dampak ekonomi bersifat sementara, dampak sosial cenderung ganda, dan dampak distribusional masih menyisakan ketimpangan. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan pada ketepatan sasaran, transparansi, serta integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya, kebijakan PKH berpotensi terus menghasilkan manfaat terbatas sekaligus persoalan sosial yang berulang di tingkat masyarakat desa.

6.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.2.1 Bagi Pemerintah Desa Ranggo

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan PKH di Desa Ranggo masih menghadapi persoalan ketidaktepatan data penerima, keterbatasan transparansi informasi, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat, maka saran bagi Pemerintah Desa Ranggo adalah agar lebih

aktif melakukan pembaruan data penerima manfaat secara berkala sesuai kondisi riil masyarakat. Pemerintah desa perlu membuka informasi PKH secara lebih terbuka, baik terkait kriteria penerima, jumlah bantuan, maupun alasan warga terdaftar atau tidak terdaftar sebagai penerima. Upaya transparansi ini penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Selain itu, pemerintah desa disarankan memperkuat quality control dalam pelaksanaan PKH melalui pengawasan, verifikasi, dan evaluasi data penerima manfaat secara lebih ketat dan berkelanjutan. Penguatan quality control penting dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Pemerintah desa juga disarankan memperjuangkan penguatan peran desa dalam proses verifikasi dan pengusulan data agar kebijakan lebih responsif terhadap kondisi lokal. Pembentukan forum komunikasi rutin antara pemerintah desa dan masyarakat juga perlu dilakukan untuk menampung keluhan serta aspirasi warga. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga keharmonisan sosial di Desa Ranggo.

6.2.2 Bagi Pendamping PKH

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendamping PKH masih menghadapi keterbatasan waktu, jangkauan pendampingan, serta beban kerja yang tinggi, maka saran bagi pendamping PKH adalah agar memperkuat fungsi pendampingan substantif, tidak hanya berfokus pada

pemenuhan kewajiban administratif penerima manfaat. Pendamping diharapkan lebih aktif memberikan pemahaman mengenai tujuan jangka panjang PKH, khususnya terkait upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Selain itu, pendamping perlu meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemerintah desa untuk menyelaraskan informasi dan merespons keluhan masyarakat secara lebih terkoordinasi. Pendamping juga disarankan berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada pengambil kebijakan di tingkat atas. Penguatan kapasitas pendamping dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial diharapkan dapat memperluas dampak PKH secara lebih berkelanjutan.

6.2.3 Bagi Penerima Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian penerima manfaat PKH masih cenderung bergantung pada bantuan dan belum menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi, maka saran bagi penerima manfaat adalah agar memanfaatkan bantuan PKH secara lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Bantuan yang diterima tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga perlu disisihkan atau direncanakan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas ekonomi keluarga sesuai kemampuan masing-masing. Penerima manfaat juga disarankan lebih aktif mengikuti kegiatan pendampingan dan menyampaikan aspirasi atau keluhan melalui jalur yang tersedia secara terbuka dan konstruktif. Kesadaran bahwa PKH merupakan bantuan sementara perlu terus ditumbuhkan agar tidak memicu ketergantungan.

Dengan sikap aktif dan terbuka, penerima manfaat diharapkan dapat menjadikan PKH sebagai pijakan awal menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 237-244.
- Anderson, James E. (2003). *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*.
- Astuti, A. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 400-412.
- Creswell, John W. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45-56.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dwijowijoto. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Easton, David. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Knopf.

- Edu, E., & Rohman, A. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 67-74.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Handoyo. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Islami. M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, O., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Golo Meni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(06), 140-152.
- Lasswell, Harold. (1960). *The Structure and Function of Communication in Society*. Urbana: University of Illinois Press.
- Malau, Kurniawan, Kusmendar, Widayati, Rozikin, Safii, dan Adhania. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.

- Nisa, N. K. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pandemi Covid-19. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 461-472.
- Nugroho. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Nur dan Guntur. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Publisher UNM.
- Ripley, Randall. B. and Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago-Illionis: The Dorsey Press.
- Roidah, I. S. (2018). Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam program keluarga harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 4(1), 39-47.
- Solichin, Abdul Wahab. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sos. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Suaib, Rakia, Purnomo, dan Ohorella. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwitri. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Thoha. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.
- Thomas R. Dye. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.

- United Nations Development Programme. (1999). Decentralization: A Sampling of Definitions', Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance. *Working Paper*.
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 11-22.
- Wibawa. (1994). *Kebijakan publik*. Intermedia Jakarta.
- Widodo. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Woll, P. (1966). *Public Administration and Policy*. New York: Harper Torchbooks.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 5(1), 256-271.

